

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)(UU Nomor 6 Tahun 2014). Desa merupakan pemerintahan yang langsung menyatu dengan kehidupan budaya, ekonomi dan sosial masyarakat sehari-hari oleh karena itu Desa dapat diposisikan sebagai kekuatan besar yang akan memberikan kontribusi terhadap misi Indonesia yang berdaulat dan Sejahtera (UU Nomor 6 Tahun 2014).

Menurut UU Nomor 32 Tahun 2004, dalam upaya meningkatkan standar hidup ekonomi masyarakat, dan menggerakkan perekonomian Masyarakat. Pemerintah membentuk suatu Lembaga yakni Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes adalah lembaga usaha desa yang dikontrol oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan, potensi dan sumber daya desa. BUMDes didirikan antara lain dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa (PAD). Lebih lanjut, sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi di pedesaan, BUMDes harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMDes mampu memberikan kontribusi signifikan

terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat

Menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 1 ayat 6 “Badan Usaha Milik Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-sebesarannya kesejahteraan masyarakat desa”. BUMDes bisa menjalankan usaha dibidang ekonomi dan/atau pelayanan umum dan dalam kegiatannya tidak hanya berorientasi terhadap keuntungan keuangan saja, akan tetapi juga berorientasi untuk mendukung kesejahteraan masyarakat desa.

Menurut Kepmendesa PDTT No.136 Tahun 2022, BUMDes adalah badan usaha yang berbadan hukum oleh karena itu pengaturan BUMDes disesuaikan dengan prinsip-prinsip korporasi, maka Kepmendesa PDTT mendorong BUMDes untuk semakin professional. Bentuk professional BUMDes salah satunya adalah pengelolaan dalam penyajian laporan keuangan. Di Indonesia Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sudah tersebar di desa-desa. Berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPM-Desa) Provinsi Jabar, jumlah BUMDes di Jabar terus bertambah dari tahun ke tahun. Pada 2018, ada 3.695 BUMDes di Jabar dari 5.311 desa. Sedangkan pada 2023, jumlah BUMDes di Jabar bertambah menjadi 5.311 BUMDes (Jabar, 2024). Kabupaten Bekasi terdiri dari 180 desa dan 7 kelurahan yang tersebar di 23 kecamatan. Dari 180 desa di Kabupaten Bekasi, 59 desa berstatus Desa Berkembang, 69 Desa Maju dan 52 Desa Mandiri, dari 180 desa tersebut, 155 desa di antaranya sudah memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang bergerak di berbagai bidang usaha dan mampu menyumbang

pendapat asli desa (PAD) (Bpbd.bekasi.kab.go.id, n.d.).

Satu di antara BUMDes di Jawa Barat terletak di Desa Hegarmukti Cikarang Pusat, Desa Hegarmukti termasuk ke dalam kategori Desa Maju, memiliki luas wilayah desa/kelurahan seluas 7,52 km² dan memiliki akses yang sangat strategis, memiliki beberapa wilayah, memiliki fasilitas pendidikan. Desa Hegarmukti adalah desa yang memiliki potensi akan pariwisata. Desa ini menjadi ikon baru bagi pariwisata yang ada di Kabupaten Bekasi. Salah satu yang dapat dijadikan sebagai potensi pariwisata adalah Situ Binong. Situ Binong menjadi keunggulan di Desa Hegarmukti yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian dari masyarakat sekitar serta ekonomi masyarakat dengan berwawasan lingkungan. Objek wisata Situ Binong atau dikenal juga dengan nama Situ Rawa Binong, memiliki akses yang sangat strategis, berada di tengah kawasan industri besar seperti Delta Mas, Jababeka, Lippo Cikarang, Kawasan Industri Terpadu Indonesia Cina (KITIC), dan Greenland International Industrial Centre (GIIC). Desa Hegarmukti memiliki akses terdekat ke pintu tol Cikarang Pusat hanya dengan jarak satu menit dari pintu tol tersebut dan didukung dengan infrastruktur jalan beraspal yang sangat lebar (Alfan Hakim, 2022).

Potensi pariwisata yang ada di Desa Hegarmukti tidak hanya Rawa Binong saja, akan tetapi nilai budaya yang menjadi daya tarik utama berupa upacara sedekah bumi yang masih menjadi tradisi masyarakat sekitar dan menjadi adat tahunan oleh masyarakat sekitar. Momen adat Sedekah Bumi tersebut selalu ditunggu-tunggu oleh masyarakat sekitar untuk bentuk rasa syukur dan menjadi daya tarik wisatawan lokal maupun manca negara. Karena selain dipandang unik

dan menarik didalamnya terdapat suatu nilai kebudayaan berupa tradisi ruwatan, ngawinkeun cai, potong hewan kerbau, ngarak tumpeng, persembahan hasil bumi dan pegelaran seni tradisional yang merupakan khazanah seni budaya asli Indonesia (Alfan Hakim, 2022).

BUMDes ini didirikan Pada tahun 2018, pada awal berdiri BUMDes Hegarmukti tidak langsung melakukan kegiatan operasionalnya melainkan menggali beberapa potensi yang berada di Desa Hegarmukti, membuat perencanaan Pembangunan BUMDes. Penggalan dan Pembangunan potensi ini memakan waktu kurang lebih dua sampai tiga tahun, dikarenakan untuk membangun desa wisata membutuhkan anggaran yang cukup besar. BUMDes Hegarmukti Ini bergerak dibidang Desa wisata, dimana BUMDes ini mengembangkan Desa Wisata yang dekat dengan aset negara di Desa Hegarmukti yakni Situ Rawa Binong, BUMDes Hegarmukti juga menjalankan usahanya seperti menyewakan bangunan untuk warung. BUMDes Hegarmukti juga aktif dalam pemanfaatan tempat sebagai ajang para UMKM menjajakan jualannya di *event* yang BUMDes dan organisasi Masyarakat adakan.

Berdasarkan wawancara dengan ketua BUMDes Hegarmukti, BUMDes ini adalah satu-satunya BUMDes yang bergerak sebagai Desa Wisata di Kabupaten Bekasi dan BUMDes ini di dampingi juga oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Bekasi. BUMDes Hegarmukti Lestari sejak tahun 2019 menghasilkan beberapa prestasi yang baik untuk kabupaten Bekasi, seperti meraih penghargaan Bumdesa Award dari Bupati Bekasi sekaligus meresmikan Bumdesa Expo tahun 2019 serta menandatangani prasasti Objek Wisata Rawa Binong, kemudian BUMDes

Hegarmukti Lestari kembali berprestasi. masuk urutan ke-4 Lomba Desa Wisata Nusantara yang digelar Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal & Transmigrasi Republik Indonesia (Adiman, 2019)

Pada tahun 2021, BUMDes Hegarmukti Lestari lolos mengikuti ajang penganugerahan Desa Wisata Indonesia 2021 yang diselenggarakan Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif (Kemenkraf) dan Badan Pariwisata Ekonomi Kreatif (Barekraf) Republik Indonesia, berbekal inventarisasi data potensi alam dan budaya, Desa Hegarmukti, masuk 28 besar dari dua ribuan desa wisata yang ada di Indonesia (Tillah, 2021). Setelah dinyatakan lolos mengikuti ajang penganugerahan Desa Wisata Indonesia 2021 yang diselenggarakan Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif (Kemenkraf) dan Badan Pariwisata Ekonomi Kreatif (Barekraf) Republik Indonesia, BUMDes Hegarmukti mengikuti serangkaian kegiatan berupa bimbingan teknis Desa Wisata yang diselenggarakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (DisParBud) Provinsi Jawa Barat (Madrawi, 2021).

Pada Desember Tahun 2022 Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI mengeluarkan Kepemendesa Nomor 136 Tahun 2022 tentang Panduan Penyusunan Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa. Pada dasarnya panduan ini dibuat berdasarkan pada peraturan-peraturan lain yang mengikat. Pada Kepmendesa Nomor 136 Tahun 2022 ini, menurut Permendesa PDPT RI Nomor 4 Tahun 2015 yang menyatakan bahwa suatu pelaksanaan operasional BUMDes, setiap bulan pihak BUMDes harus melaporkan laporan keuangan BUMDes beserta seluruh unit-unit usaha BUMDes. Sehingga nantinya laporan keuangan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kaidah yang benar

karena terciptanya tata kelola keuangan BUMDes yang baik. Suatu pengelolaan BUMDes harus transparan atau terbuka sehingga ada mekanisme *check and balance* baik oleh Pemerintah Desa maupun masyarakat serta perlunya disusun rencana-rencana pengembangan usaha. Sehingga diperlukan monitoring dan evaluasi sebagai mekanisme atau prosedur pengawasan agar setiap kegiatan dan setiap transaksi dapat dikontrol (Wijaya et al., 2022)

BUMDes harus membuat laporan keuangan yang transparan, akuntabel dan mudah dipahami, karena akan dipertanggungjawabkan ke berbagai pihak seperti pemerintah Desa. BUMDes harus membuat laporan keuangan dengan wajar sebab BUMDes adalah bagian dari institusi usaha yang dananya berasal dari pemerintah yakni Dana Desa dan juga dana dari masyarakat untuk modal usahanya. Laporan keuangan yang berpedoman kepada standar akuntansi keuangan yang berlaku menjadi acuan bagi pihak yang pengelola BUMDes, Pelaporan keuangan tidak sesuai dan tidak jelas dapat menjadi berisiko karena dapat dikatakan sebagai bentuk penyelewengan atau penyalahgunaan dan dapat berakibat pada masalah yang berkaitan dengan hukum dan harus dipertanggungjawabkan (Saputra, 2021).

Berdasarkan wawancara oleh ketua BUMDes Hegarmukti Lestari proses pencatatan akuntansi yang dilakukan pada BUMDes Hegarmukti Lestari Cikarang Pusat hanya mencatat pemasukan dan pengeluaran kas sederhana, BUMDes hanya melaporkan catatan transaksi yang telah terjadi kepada Pemerintah Desa sebagai laporan pertanggungjawaban atas kinerja BUMDes tersebut selama satu tahun berjalan. Dalam hal ini belum sesuai dengan standar yang harus diterapkan yakni berpedoman pada Kepmendesa PDTT No.136 Tahun 2022 ini karena BUMDes

memiliki kendala yakni kurangnya pemahaman pihak pengelola BUMDes mengenai pedoman dan peraturan standar akuntansi yang ada dikarenakan bukan berasal dari *background* tersebut, sehingga pelaporan yang dilakukan hanya dalam bentuk pencatatan sederhana saja.

Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya banyak BUMDes yang belum menyusun Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi yang sesuai yaitu pada Penelitian yang dilakukan oleh (Suarsana & Sinarwati, 2024) yang berjudul Analisis Penyajian Laporan Keuangan Bumdes Mengacu pada KepmenDesa PDTT No 136 Tahun 2022 (Studi Kasus Pada BUMDes Nugraha Tata Samaya di Desa Pejarakan), hasil yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu BUMDes Nugraha Tata Samaya ini telah mengetahui terkait KepmenDesa PDTT No 136 Tahun 2022 terkait penyajian laporan keuangan, namun belum dapat menyesuaikan hal tersebut. BUMDes ini juga tidak dapat menggunakan aplikasi untuk menyajikan laporan keuangan, hal ini dikarenakan kurangnya sumber daya manusia yang dimiliki serta dengan demikian laporan keuangan yang dibuat masih banyak terdapat kekeliruan hasil dan jenis laporan keuangan yang dibuat oleh BUMDes. Penelitian yang dilakukan oleh (Arafah Arifin, 2022) hasil penelitian mengungkapkan bahwa BUMDes di kecamatan Lambu sebagian sudah membuat laporan keuangan pada usahanya, BUMDes Usaha hanya membuat satu laporan keuangan, yakni neraca. BUMDes Maja labo dahu hanya membuat laporan laba rugi. BUMDes Damai membuat dua laporan keuangan yakni laporan laba rugi dan neraca. BUMDes Meci Angi tidak membuat laporan keuangan, hanya membuat buku kas umum berupa kas masuk dan kas keluar. BUMDes Mantika Lanta hanya membuat laporan perubahan

modal. BUMDes Usaha Rato hanya membuat satu laporan keuangan, yakni neraca. BUMDes Sama Kai Desa Sumi hanya membuat neraca. BUMDes Melayu Mekar tidak membuat laporan keuangan, hanya membuat buku kas umum berupa kas masuk dan kas keluar. BUMDes Soro Mandiri Desa Soro hanya membuat neraca. BUMDes Mangge hanya membuat buku kas umum dan tidak membuat laporan keuangan. BUMDes Luu Lambu Desa Lambu hanya membuat laporan laba rugi saja. BUMDes Hidi Rasa tidak membuat laporan keuangan, hanya membuat buku kas umum berupa kas masuk dan kas keluar. BUMDes Harapan Bersama Desa Nggelu hanya membuat satu laporan keuangan, yakni neraca. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka Penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada BUMDes Hegarmukti Lestari dengan judul **“Penyusunan Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Hegarmukti Lestari Cikarang Pusat Berdasarkan Kepmendesa PDTT No.136 Tahun 2022 dengan Microsoft Excel”**

B. Pertanyaan Penelitian

Berikut pertanyaan penelitian ditinjau berdasarkan latar belakang permasalahan pada penelitian ini :

1. Bagaimana penyusunan laporan keuangan yang diterapkan BUMDes Hegarmukti Lestari Cikarang Pusat saat ini?
2. Bagaimana rekomendasi penyusunan Laporan Keuangan BUMDes Hegarmukti Lestari Cikarang Pusat yang sesuai Kepmendesa PDTT No.136 Tahun 2022 dengan Microsoft Excel?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian pada latar belakang perumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah;

1. Untuk Implementasi Kepmendesa PDTT Nomor 136 Tahun 2022 pada Laporan Keuangan BUMDes Hegarmukti Lestari Cikarang Pusat.
2. Untuk merekomendasikan penyusunan laporan keuangan BUMDes Hegarmukti Lestari Cikarang Pusat berdasarkan Kepmendesa PDTT No.136 Tahun 2022 dengan menggunakan Microsoft excel.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktik

1. Manfaat Teoritis

Mendukung Kepmendesa PDTT No. 136 Tahun 2022 pada proses penyusunan Laporan Keuangan BUMDes Hegarmukti Cikarang Pusat serta dapat dijadikan tambahan sumber literatur bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi BUMDes

Penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada pengelola berupa pengetahuan tentang bagaimana kebijakan akuntansi dan penerapan standar laporan keuangan yang sesuai dalam menyusun laporan keuangan sehingga laporan keuangan yang dihasilkan dapat dipercaya, dan tercapainya prinsip akuntansi yaitu transparansi dan akuntabilitas pada laporan keuangan agar kedepannya BUMDes Hegarmukti Lestari Cikarng Pusat dapat lebih baik lagi.

b. Bagi Pemerintah Desa

Penelitian membantu pemerintah desa memastikan bahwa penyusunan laporan keuangan BUMDes Hegarmukti Lestari Cikarang Pusat sesuai dengan peraturan dan standar akuntansi yang berlaku. Kepatuhan ini penting untuk menghindari masalah administratif di masa depan dan laporan keuangan ini membantu pemerintah desa sebagai bahan perencanaan, penganggaran, dan pengawasan keuangan BUMDes.

c. Bagi Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada Kementerian Desa yaitu membantu menerapkan penyusunan laporan keuangan BUMDes pada BUMDes Hegarmukti Lestari Cikarang Pusat berdasarkan Kepmendesa PDTT No. 136 Tahun 2022.

Intelligentia - Dignitas